

Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi Spasial di Kalimantan: Studi Empiris di 55 Kabupaten/Kota, 2000–2012

Analysis of Growth Poles and Spatial Autocorrelation in Kalimantan: An Empirical Study of 55 Districts, 2000–2012

Maria Christina Yuli Pratiwi^{a,*}, Mudrajad Kuncoro^b

^aBappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

^bFakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

[diterima: 7 Juli 2015 — disetujui: 6 Oktober 2016 — terbit daring: 3 Januari 2017]

Abstract

The paper identifies which districts in Kalimantan that become the growth poles and whether there has been spatial autocorrelation in 55 districts during 2000–2012. This study also explores which economic sectors will be leading sectors. The social-economic data were collected for 55 districts using quantitative methods, in particular: typology of Regent/City, spatial autocorrelation, overlay analysis, and structural transformation. The study finds: (1) there are 4 cities as the growth pole; (2) the economics growth concentration concentrated geographically in the eastern and western; (3) the mining sector is a leading and competitive sector; and (4) structural transformation does not occur in all districts.
Keywords: Growth Pole; Typology of Regent/City; Spatial Autocorrelation (Moran's I and G Statistics); Overlay Analysis; Structural Transformation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang akan menjadi pusat pertumbuhan dan apakah terdapat autokorelasi spasial di 55 kabupaten/kota selama periode 2000–2012. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari data sosial ekonomi 55 kabupaten/kota menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan alat analisis: tipologi Kabupaten/Kota, autokorelasi spasial, analisis *overlay*, dan transformasi struktural. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat empat kota sebagai pusat pertumbuhan; (2) konsentrasi pertumbuhan ekonomi tersebar di bagian timur dan barat Pulau Kalimantan; (3) sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor unggulan dan kompetitif; dan (4) transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota.

Kata kunci: Pusat Pertumbuhan; Tipologi Kabupaten/Kota; Autokorelasi Spasial (*Moran's I* dan Statistik *G*); Analisis *Overlay*; Transformasi Struktural

Kode Klasifikasi JEL: R11; R12

Pendahuluan

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya

yang dilakukan secara terencana. Todaro & Smith (2006: 22) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan pendapatan antar-penduduk dan antar-sektor yang semakin ke-

* Alamat Korespondensi: Bappeda Kotawaringin Timur, Jl. Jend. Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kalimantan Tengah. E-mail: mcy.pratiwi@yahoo.co.id.

cil. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan perekonomiannya meningkat atau lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi pemerataan sehingga menimbulkan berbagai dilema dalam pembangunan nasional dan justru memperlebar kesenjangan antar-wilayah serta menimbulkan permasalahan ekonomi yang berlapis-lapis.

Pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan suatu wilayah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar-wilayah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan menetapkan kota atau wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*). Pusat pertumbuhan merupakan salah satu cara untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan secara mikro untuk wilayah tertentu telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini terlihat dengan makin banyaknya daerah-daerah di Indonesia menerapkan kegiatan pembangunan wilayah, seperti pola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Masyarakat Industri dan Perkebunan (KIMBUN), dan yang terbaru yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan

spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Pulau Kalimantan merupakan pusat pembangunan di Wilayah Timur Indonesia yang memiliki posisi strategis bagi kerja sama antar-daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang besar berupa keunggulan kompetitif pada sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan laut dan darat, membuat Pulau Kalimantan dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan sosial di Kawasan Timur Indonesia. Walaupun sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih tinggi dibanding tiga wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia, tetapi hasil pembangunan di Pulau Kalimantan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan antar-daerah (Kuncoro & Idris, 2010: 173).

Berdasarkan keadaan tersebut, beberapa pertanyaan akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) sejauh mana perkembangan perekonomian wilayah Kalimantan selama periode 2000–2012? (2) di mana lokasi pusat-pusat pertumbuhan menurut kabupaten/kota? (3) di mana letak konsentrasi pertumbuhan di sekitar pusat-pusat pertumbuhan? (4) sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan dan kompetitif di kabupaten/kota? (5) apakah terjadi transformasi struktural atau tidak di seluruh kabupaten/kota? dan (6) masukan kebijakan apa yang diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan?

Penelitian ini secara teknis bertujuan: (a) mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan menurut kabupaten/kota; (b) mengetahui konsentrasi pertumbuhan yang terjadi di sekitar daerah pusat-pusat pertumbuhan; (c) mengidentifikasi potensi pengembangan perekonomian di wilayah Kalimantan; (d) mengetahui sektor-sektor unggulan dan kompetitif di kabupaten/kota; (e) mengetahui kesesuaian penentuan rencana pembangunan koridor ekonomi (KE) dalam naskah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); dan (f) memberikan arah kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat regional (Kalimantan) dalam kaitannya dengan upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar-daerah.

Tabel 1: Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 1978–2012 (dalam persen)

Pulau	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2012
Sumatera	27,6	28,7	24,9	22,8	22	22,4	21,4	20,9
Jawa	50,6	53,8	57,4	58,6	58	59,3	60,9	61,4
Kalimantan	10,2	8,7	8,9	9,2	9,9	9,3	8,8	8,4
Sulawesi	5,5	4,2	4,1	4,1	4,6	4,2	4,6	5,0
Bali dan Nusa Tenggara	3,1	2,8	3,0	3,3	2,9	2,8	2,7	2,6
Maluku dan Papua	2,9	1,8	1,7	2,0	2,5	2,0	1,6	1,7

Sumber: BPS (1978–2012), diolah

Tinjauan Literatur

Perroux (1950) dalam Muta'ali (1999: 3) mengemukakan sebuah Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*) yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan yang banyak dipakai di berbagai negara dewasa ini. Pusat pertumbuhan berawal dari fakta bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama, tetapi hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas berbeda. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah cenderung beraglomerasi atau terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan lokal.

Berdasarkan interpretasi spasial yang dikemukakan beberapa ahli terhadap konsep pusat pertumbuhan (seperti Myrdal (1957), Boudville (1966), dan Friedmann (1972) dalam Muta'ali (1999: 3)), dapat disimpulkan bahwa pusat pertumbuhan dapat mendorong *spread effect* atau *trickling down effect* dan *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya, seperti terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, dan penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatif disebut *backwash effect*. Contohnya, adalah adanya ketimpangan wilayah, kriminalitas dan kerusakan lingkungan meningkat.

Penelitian tentang kutub pertumbuhan telah banyak dilakukan. Sebagai pembanding, diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dalam Tabel 2.

Menurut Lewis dalam teorinya, yaitu model dua sektor Lewis (*Lewis two-sector model*), di negara berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, dan lebih berorientasi pada kehidupan perkotaan,

serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Teori Lewis diakui sebagai teori umum yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja (Todaro & Smith, 2003: 116).

Diduga, terjadi transformasi struktur ekonomi di Pulau Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sumbangan sektor industri pengolahan ke sektor keuangan/persewaan dan jasa perusahaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan. Tabel 3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2000–2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan kalah cepat dibandingkan dengan sektor keuangan/persewaan yang cenderung naik. Sumbangan sektor industri pengolahan yang semula sebesar 32,84% pada tahun 2000 turun sekitar 45% menjadi 17,96% pada tahun 2012. Sektor keuangan/persewaan dan jasa perusahaan yang semula menyumbang 2,61% pada tahun 2000 naik 74% menjadi 4,53% pada tahun 2012.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kalimantan yang mencakup 4 provinsi, 9 kota, dan 46 kabupaten dengan periode amatan tahun 2000–2012. Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga indikator sosial ekonomi kabupaten/kota, yaitu PDRB non-minyak dan gas (non-migas), pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan rentang waktu tahun 2000–2012.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan beberapa alat analisis, yaitu Tipologi Kabupaten/Kota, Analisis *Overlay*, Transformasi Struktural,

Tabel 2: Hasil Penelitian tentang Kutub dan Pusat Pertumbuhan

No.	Peneliti/Tahun	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Penelitian di Luar Negeri			
1	Sridhar (2006)	Analisis Regresi Linier Berganda	Di India, jumlah penduduk di provinsi dan potensi pertumbuhannya signifikan terhadap status aktual dari kutub pertumbuhan.
2	Kubis <i>et al.</i> (2007)	Analisis <i>Cluster</i> , <i>Cross-Sectional Models</i> , <i>Spatial Models</i> , <i>Treatment Effect Models</i>	Daerah metropolitan Jerman dan 22 daerah NUTS3 (<i>Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques</i> : kabupaten, kabupaten-kota bebas, dan negara-negara bagian Berlina dan Hamburg) adalah kutub pertumbuhan terkuat. Sektor sekunder memberi efek <i>spillover</i> tinggi bagi daerah tetangga.
3	Adams-Kane & Lim (2011)	Regresi OLS dan GMM	Polaritas pertumbuhan merupakan variabel penjabar dalam pertumbuhan lintas negara untuk menguji sejauh mana limpahan pertumbuhan yang dihasilkan dari kutub pertumbuhan dunia.
4	Ogunleye (2011)	Polaritas Pertumbuhan dan Analisis <i>Cluster</i>	Afrika Selatan, Botswana, Nigeria, Angola, dan Kenya merupakan kutub-kutub pertumbuhan yang paling konsisten di Sub Sahara Afrika. Ghana, Kamerun, Ethiopia, Tanzania, dan Guinea adalah daerah-daerah pusat pertumbuhan potensial di <i>Sub-Saharan Africa</i> (SSA).
5	Mushuku & Takuva (2013)	Kuesioner, Wawancara, Observasi Lapangan, dan Dokumen	Pertumbuhan industri di Nemamwa-Zimbabwe (titik pertumbuhan) berjalan lambat yang disebabkan oleh kurangnya modal, informasi, area kerja, tingkat kepemilikan, dan sewa yang tinggi.
Penelitian di Dalam Negeri			
6	Muta'ali (2003)	Teknik pembobotan, Analisis Guttman, Skalogram dan Indeks Sentralitas. Analisis <i>Location Quotient</i> , dan Analisis Statistik Korelasi Spearmann	Desa-desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki aksesibilitas lokasi cukup baik, dengan sistem spasial hirarki pelayanan yang menunjukkan gejala primasi dan kesenjangan. Basis kegiatan ekonomi terletak pada sektor pertanian dengan dukungan sektor jasa, perdagangan, dan industri.
7	Sugiyanto (2010)	Perhitungan nilai/score terhadap Variabel/sub-variabel dan Indikator	Dipilih 5 kecamatan yang potensial dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Sematu Jaya. Sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Lamandau adalah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, hasil hutan, serta pertambangan (mineral dan batu bara).
8	Danastri (2011)	Analisis Basis Ekonomi, Analisis Gravitasi, Analisis Skalogram, dan Metode <i>Overlay</i>	Kelurahan Kecapi, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, dan kesehatan. Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah. Kelurahan Argasanya berpotensi sebagai pusat pemukiman.
9	Ardila (2012)	Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, Metode Gravitasi, Analisis Tipologi Klassen, dan Analisis <i>Location Quotient</i>	Diperoleh 6 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sebagai pusat pertumbuhan yang saling berinteraksi dengan kecamatan di sekitarnya. Kondisi perekonomian dan sektor basis di tiap kecamatan berbeda-beda.
10	Pamungkas (2013)	Autokorelasi Spasial (<i>Moran's I</i>) dan <i>Spillover Effects</i>	Kutub-kutub pertumbuhan di Koridor Ekonomi (KE) Sulawesi tidak selalu berada di pusat ibukota provinsi sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Kutub-kutub pertumbuhan terdapat di Makasaar, Sidenreng, Rappang, Wajo, Soppeng, Pinrang, Jeneponto, Banteng, Selayar, Gorontalo, Morowali, Banggai, Buton, dan Wakatobi.
11	Rahayu & Santoso (2014)	Analisis <i>Scalogram</i> dan Tipologi Klassen	Terdapat 4 kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kecamatan Wonosari, Playen, Semanu, dan Karangmojo.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pulau Kalimantan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2000–2012 (dalam persen)

No.	Lapangan Usaha	2000	2004	2008	2012
1	Pertanian	14,87	15,13	14,89	14,58
2	Pertambangan dan Penggalian	25,89	26,61	28,12	29,37
3	Industri Pengolahan	32,84	28,9	22,77	17,96
4	Listrik, Gas, dan Air	0,31	0,35	0,38	0,41
5	Bangunan	3,74	4,07	4,93	5,63
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,48	11,54	12,5	13,69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,99	5,45	6,82	7,61
8	Keuangan/Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,61	2,97	3,88	4,53
9	Jasa-jasa	4,27	4,97	5,71	6,23

Sumber: BPS (2000–2012), diolah

dan Autokorelasi Spasial (*Moran's I* dan statistik G).

Tipologi Kabupaten/Kota

Tipologi kabupaten/kota merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan suatu daerah. Daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita suatu daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita pada sumbu horizontal. Ada empat klasifikasi daerah dalam tipologi kabupaten/kota yaitu: (1) daerah cepat maju dan tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi; (2) daerah berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pendapatan per kapitanya rendah; (3) daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya rendah; dan (4) daerah tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah.

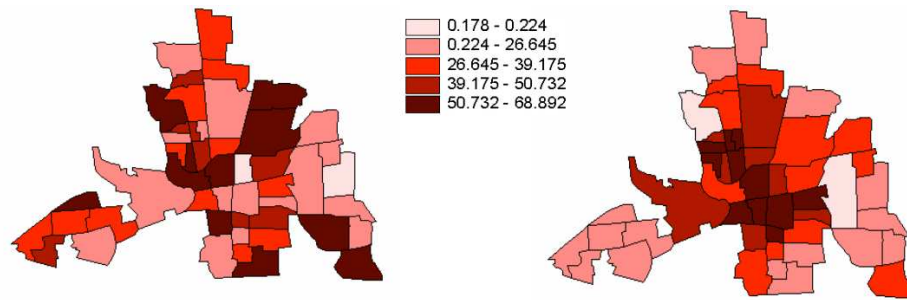
Autokorelasi Spasial

Menurut Lembo (2006) dalam Kartika (2007: 1), keterkaitan spasial atau autokorelasi spasial terjadi karena adanya interaksi antar-wilayah atau suatu ukuran kemiripan dari objek di dalam suatu ruang (jarak, waktu, dan wilayah). Interaksi ini merefleksikan kondisi yang mana nilai pengamatan di wilayah i dipengaruhi oleh nilai pengamatan di wilayah sekitarnya, misalnya wilayah j ($i \neq j$). Jika terdapat pola sistematis di dalam penyebaran

sebuah variabel, maka terdapat autokorelasi spasial. Adanya autokorelasi spasial mengindikasikan bahwa nilai atribut pada daerah tertentu terkait oleh nilai atribut tersebut pada daerah lain yang letaknya berdekatan (bertetangga). Dalam ruang lingkup analisis spasial, keterkaitan antar-wilayah dapat dipandang sebagai hubungan positif atau negatif. Hubungan positif terjadi bila wilayah dengan karakteristik tertentu berada pada lingkungan yang memiliki karakteristik sama dengan wilayah tersebut. Sementara hubungan negatif terjadi bila wilayah dengan karakteristik tertentu berada pada lingkungan dengan karakteristik yang berbeda dengan wilayah tersebut.

Autokorelasi spasial adalah suatu penaksiran korelasi antara suatu variabel terhadap dirinya dalam suatu wilayah. Suatu variabel dikatakan autokorelasi jika suatu variabel spasial X dengan observasi x_1, x_2, \dots, x_n terbukti saling memengaruhi antar-wilayah. Karakteristik dari autokorelasi spasial adalah sebagai berikut. *Pertama*, jika terdapat pola sistematis pada distribusi spasial dari variabel yang diamati, maka terdapat autokorelasi spasial. *Kedua*, jika variabel daerah terdekat (*neighboring regions*) memiliki kemiripan karakteristik, maka terdapat autokorelasi spasial positif. *Ketiga*, jika variabel daerah terdekat (*neighboring regions*) tidak memiliki kemiripan karakteristik, maka terdapat autokorelasi spasial negatif. Dan *keempat*, pola *random*/acak menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi spasial. Sebagai ilustrasi dapat terlihat pada Gambar 1.

Moran's I merupakan metode yang digunakan sebagai identifikasi karakteristik pola spasial dalam tiga bentuk meliputi pemusatan (*clustering*), acak (*random*), dan terpisah (*uniform*). *Moran's I* digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi spasial suatu wilayah. Metode *Moran's I* terdiri dari dua cara, yaitu *Moran's I* global dan *Moran's I*



Gambar A. Pola *Random*
 Nilai observasi pada suatu daerah tidak dipengaruhi oleh nilai observasi daerah tetangga.

Gambar B. Klasterisasi spasial
 Nilai observasi yang mirip cenderung terkonsentrasi.
 Terdapat kemiripan pada daerah tetangga.

Gambar 1: Pola Spasial dari Variabel Kewilayahan
 Sumber: Kosfeld (2006)

lokal. *Moran's I* global adalah analisis spasial pada skala yang luas, sedangkan *Moran's I* lokal atau *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA) adalah kuantifikasi autokorelasi dalam wilayah yang lebih kecil. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Moran's I* lokal.

LISA menyediakan informasi detail dalam klasifikasi spasial terkait dengan nilai *Moran's I* lokal dan statistik *Getis-Ord G* (Kosfeld, 2006: 55; Kosfeld, 2011). Dengan menggunakan program *Open GeoDa* diperoleh informasi mengenai klasifikasi spasial di tingkat lokal (antar-daerah yang berdekatan). *Output* yang dihasilkan berupa *LISA cluster map* atau peta kluster spasial yang menunjukkan adanya kluster spasial dengan konsentrasi tinggi atau rendah. Sedangkan *G statistics* atau statistik *G* merupakan suatu ukuran dari konsentrasi lokal spasial yang mengindikasikan adanya klusterisasi spasial tinggi (*hot spot*) atau klusterisasi spasial rendah (*cold spot*), serta untuk melihat kekuatan atau konsentrasi pertumbuhan pada kluster yang terbentuk.

Analisis *Overlay*

Model ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor unggulan dengan menggabungkan pendekatan alat analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Location Quotient* (LQ). Tujuannya adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi (analisis LQ) dan kriteria rasio pertumbuhan wilayah (analisis MRP). Identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan di-

tunjukkan melalui *overlay* antara Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), dan LQ. Koefisien dari ketiga komponen tersebut disamakan satuannya dengan diberikan notasi positif (+) yang berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu dan negatif (-) berarti kurang dari satu.

Identifikasi sektor-sektor unggulan dari hasil *overlay*, yang dibedakan dalam tiga kriteria, adalah sebagai berikut. *Pertama*, RPR, RPs, dan *Static Location Quotient* (SLQ) ketiganya bernilai positif (+), berarti sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral tinggi di wilayah referensi dan pertumbuhan serta kontribusi sektoral di wilayah penelitian juga lebih tinggi dari wilayah referensi, artinya sektor ini di wilayah penelitian memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di wilayah referensi. Dengan kata lain, sektor tersebut menonjol baik di wilayah referensi maupun di wilayah penelitian. *Kedua*, hasil *overlay* yang menunjukkan nilai negatif (-) pada RPR sedangkan RPs dan SLQ bernilai positif (+), artinya bahwa kegiatan sektoral di wilayah penelitian lebih unggul dari kegiatan yang sama di wilayah referensi, baik dari sisi pertumbuhan maupun kontribusinya, tetapi pertumbuhan sektoralnya rendah atau tidak menonjol di wilayah referensi. Dengan kata lain bahwa sektor tersebut merupakan sektor spesialis di wilayah penelitian. Dan *ketiga*, RPR, RPs, dan SLQ ketiganya bernilai negatif (-), artinya bahwa sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun

komparatif yang unggul dibandingkan kegiatan yang sama di wilayah referensi.

Metode LQ terdiri dari 2 jenis yaitu: SLQ dan *Dynamic Location Qoutient* (DLQ). Rumus SLQ (Kuncoro & Idris, 2010: 177) adalah:

$$SLQ = \frac{q_i/q_r}{Q_i/Q_n} \quad (1)$$

dengan:

SLQ : koefisien SLQ;

q_i : nilai *output* (PDRB) sektor i daerah r (kabupaten/kota);

q_r : PDRB total semua sektor di daerah r (provinsi);

Q_i : nilai *output* (PDRB) sektor i nasional;

Q_n : PDRB total di semua sektor secara nasional.

Sedangkan DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodir laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Rumus DLQ (Kuncoro & Idris, 2010: 178):

$$DLQ_{ij} = \frac{(1 + g_{ij})/(1 + g_j)}{(1 + G_i)/(1 + G_j)} = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i} \quad (2)$$

dengan:

DLQ_{ij} : indeks potensi sektor i di regional;

g_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di regional;

g_j : rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional;

G_i : laju pertumbuhan sektor i di nasional;

G : rata-rata laju pertumbuhan sektor nasional di nasional;

$IPPS_{ij}$: indeks potensi pengembangan sektor i di regional;

$IPPS_j$: indeks potensi pengembangan sektor i di nasional.

Tabel 4: Klasifikasi Sektor Berdasarkan Gabungan Nilai SLQ dan DLQ

Kriteria	SLQ > 1	SLQ < 1
DLQ > 1	Unggulan	Andalan
DLQ < 1	Prospektif	Tertinggal

Sumber: Kuncoro & Idris (2010: 178)

Transformasi Struktural

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan perubahan struktural, yakni perubahan yang terjadi pada landasan kegiatan ekonomi dan pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pertumbuhan

ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern atau transformasi struktural dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian atau dari sektor industri ke sektor jasa, yang mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, total PDRB, ekspor, dan kesempatan kerja.

Untuk mengukur seberapa cepat suatu daerah mengalami transformasi perekonomian, dapat menggunakan Indeks Transformasi Struktural (ITS) (Hill *et al.* (2009) dalam Kuncoro & Idris, 2010: 179). ITS digunakan untuk melihat pergeseran peran masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten/kota.

Rumus ITS (Kuncoro & Idris, 2010: 179) adalah:

$$ITS = \sum |share_{i,tahun\ terakhir} - share_{i,tahun\ awal}| \quad (3)$$

dengan:

i : 9 sektor ekonomi;

\sum : jumlah;

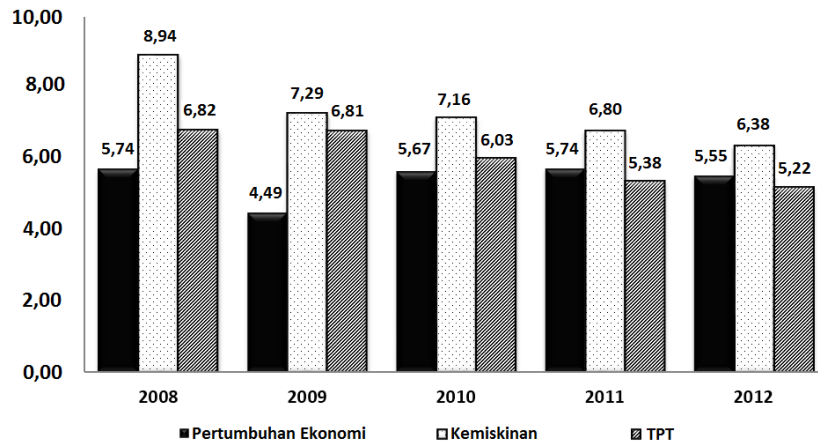
$share_i$: sumbangan sektor ke- i .

Hasil dan Analisis

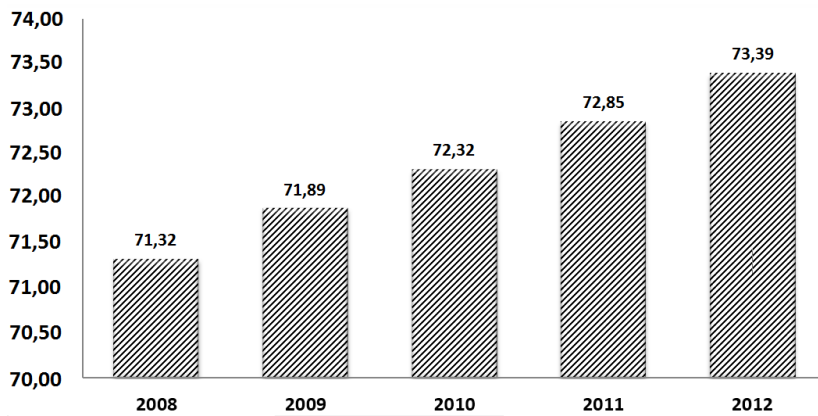
Capaian Pembangunan Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan adalah sebuah pulau yang terletak di bagian tengah Indonesia dan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia dengan luas seluruhnya 546.559,76 km² atau 29,38% luas wilayah Indonesia. Secara administratif, Pulau Kalimantan terbagi dalam 4 provinsi dengan 48 kabupaten dan 9 kota.

Perkembangan pembangunan di Pulau Kalimantan dapat diukur melalui perbandingan beberapa indikator ekonomi sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Kinerja pembangunan ekonomi di Pulau Kalimantan



Gambar 2: Perbandingan Tiga Indikator Sosial Ekonomi Pulau Kalimantan Tahun 2008–2012
Sumber: BPS (2008–2012), diolah



Gambar 3: Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Pulau Kalimantan Tahun 2008–2012
Sumber: BPS (2008–2012), diolah

selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup baik (Gambar 2 dan Gambar 3). Hal ini ditunjukkan dari nilai pertumbuhan ekonomi yang mengalami perubahan cukup signifikan, namun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung meningkat, sedangkan angka pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) dan angka kemiskinan cenderung menurun.

Pulau Kalimantan memiliki posisi yang cukup strategis di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Pulau Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batu bara), kehutanan (kayu), perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat. Pulau Kalimantan juga memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batu bara, dan biji besi terbesar di Indonesia, serta kawasan hutan produksi terluas di Indonesia. Dari produktivitasnya, wilayah Kalimantan berada di nomor empat sebagai produsen bauksit terbesar di dunia dan pengeksport batu bara di beberapa negara ASEAN. Hasil perkebunan kelapa sawit wilayah Kalimantan menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat nasional maupun ASEAN.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia menyusun Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Masterplan ini berisi arahan strategis dalam percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun dari tahun 2011 sampai 2025. Berkaitan dengan MP3EI tersebut, sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional". Penetapan Koridor Ekonomi (KE) Kalimantan sebagai pilar energi nasional tidak terlepas dari potensi migas dan batu bara. Tahun 2008, cadangan minyak mentah dan batu bara di Pulau Kalimantan masing-masing mencapai 9,3% dan 49,6% dari cadangan batu bara nasional. Kegiatan-kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Kalimantan berpusat di empat kota pusat ekonomi, yaitu kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda.

Klasifikasi Wilayah dan Penentuan Pusat Pertumbuhan

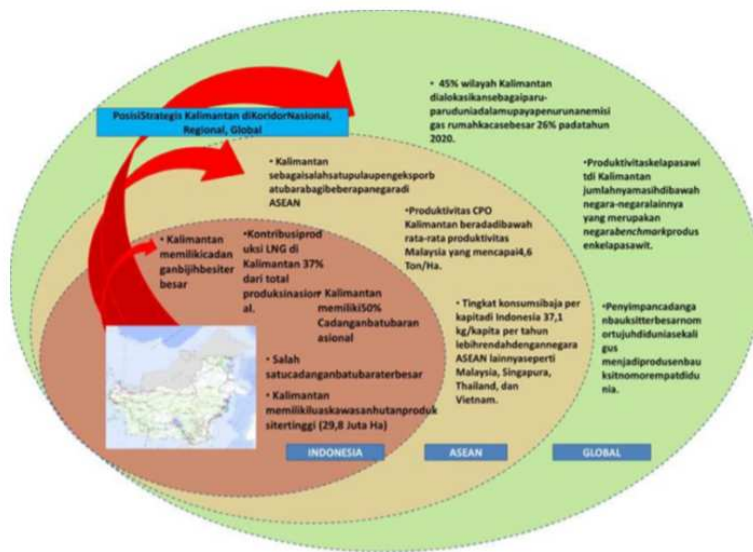
Tipologi Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Kabupaten/Kota (non-migas) di Pulau Kalimantan (Gambar 5) diperoleh bahwa 14 kabupaten/kota termasuk dalam daerah cepat maju dan tumbuh, 8 kabupaten/kota merupakan daerah berkembang cepat, 5 kabupaten/kota termasuk dalam daerah maju tertekan, dan 28 daerah merupakan daerah tertinggal. Mayoritas kabupaten/kota yang termasuk dalam daerah maju cepat tumbuh berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan mayoritas daerah tertinggal berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

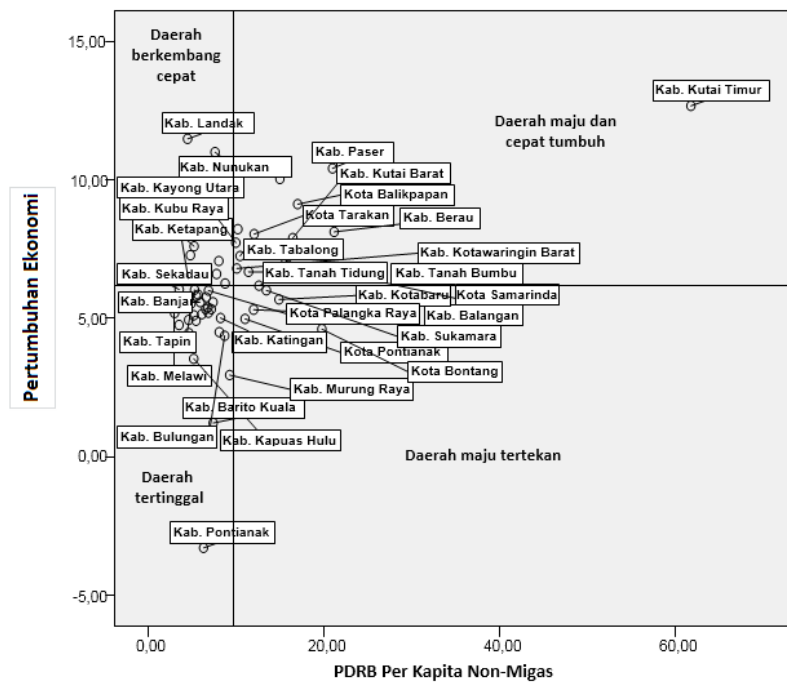
Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha (Tarigan (2005) dalam Sugiyanto, 2010: 204). Sebagaimana data yang diperoleh dari Bappenas (2012), pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan terdapat di empat ibu kota provinsi, yaitu kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Keempat kota tersebut merupakan pusat kegiatan-kegiatan ekonomi utama di KE Kalimantan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Selain itu, terkait dengan naskah MP3EI 2011–2015, Pemerintah telah menetapkan ibu kota-ibu kota provinsi di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing koridor ekonomi. Hal ini semakin menguatkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan terdapat di empat ibukota Provinsi (Gambar 6).

Autokorelasi Spasial

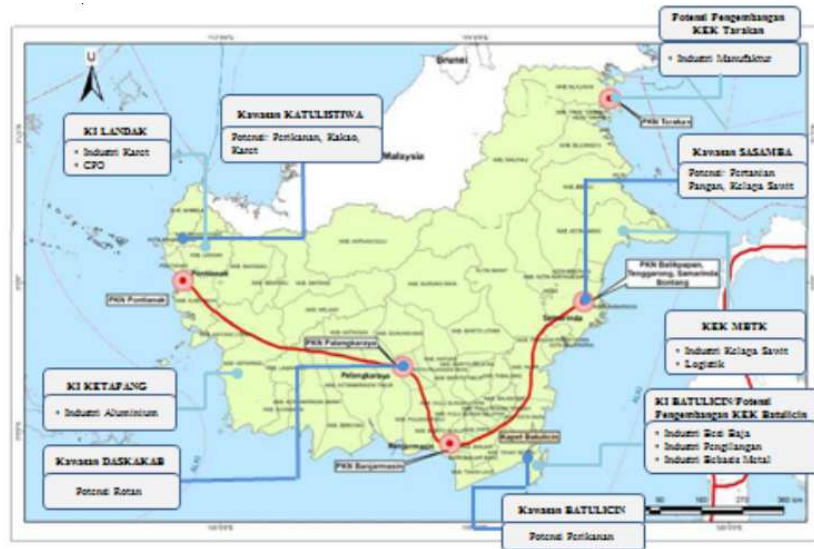
Moran's Scatterplot menunjukkan pola hubungan pendapatan per kapita antar-kabupaten/kota. Untuk melihat adanya autokorelasi spasial kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *Moran's I* variabel PDRB per kapita. Nilai *Moran's I* dalam penelitian ini dihitung menggunakan matrik penimbang dengan metoda



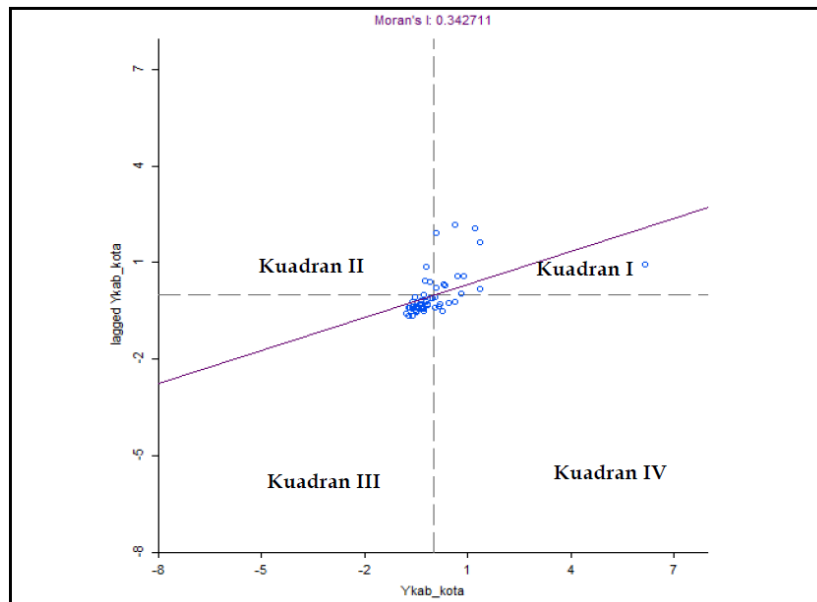
Gambar 4: Peta Daya Saing Posisi Strategis Wilayah Pulau Kalimantan di Koridor Nasional, Regional, dan Global
Sumber: Bappenas (2011)



Gambar 5: Tipologi Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Menurut PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Tahun 2000–2012
Sumber: BPS (2000–2012), diolah



Gambar 6: Sebaran Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan
 Sumber: Bappenas (2012)



Gambar 7: Moran's Scatterplot PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2000-2012
 Sumber: Hasil Pengolahan dengan GeoDa

queen contiguity orde 3. Perlakuan khusus diberikan pada kabupaten/kota yang tidak memiliki daerah tetangga (*neighborless*), yaitu Kota Tarakan. Di kota ini diberikan penambahan daerah terdekat pada matriks penimbang wilayahnya.

Berdasarkan hasil *Moran's Scatterplot*, diperoleh bahwa terdapat 12 kabupaten/kota termasuk dalam kuadran I (*high-high*) dan 34 kabupaten/kota dalam kuadran III (*low-low*). Daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran I dan kuadran III memiliki arti bahwa daerah-daerah dengan PDRB per kapita tinggi akan dikelilingi daerah-daerah dengan PDRB per kapita yang juga tinggi, dan daerah-daerah dengan PDRB per kapita rendah akan dikelilingi daerah-daerah dengan PDRB per kapita yang juga rendah. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran I didominasi kabupaten/kota dari Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata PDRB per kapitanya di atas rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota se-Kalimantan.

Nilai *Moran's I* diperoleh sebesar 0,342711 (positif), artinya terdapat autokorelasi spasial positif antar-kabupaten/kota. Autokorelasi spasial positif tersebut menunjukkan bahwa antar-kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki keeratan hubungan berdasarkan variabel PDRB per kapitanya. 9 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki autokorelasi spasial dan 46 kabupaten/kota lainnya tidak terdapat autokorelasi spasial (Gambar 8).

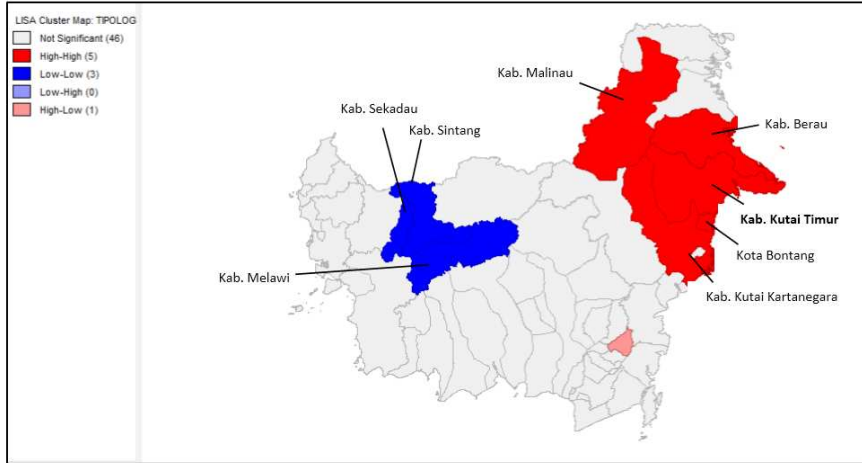
Untuk melihat klusterisasi spasial di Pulau Kalimantan, digunakanlah *LISA Cluster Map*. Dari hasil *LISA Cluster Map* (Gambar 8) diperoleh dua kluster yang terbentuk, yaitu di bagian timur dan barat Pulau Kalimantan. Hasil ini akan digabung dengan peta *percentil* pada Gambar 9 dan diperoleh pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Timur. Letak geografis Kabupaten Kutai Timur cukup strategis berada pada jalur poros regional lintas Trans-Kalimantan dan poros segitiga pertumbuhan BONSA SEMAWA (Bontang-Samarinda-Sebulu-Muara Wahau), TANRE MAWA (Tanjung Redeb-Muara Wahau), dan PANDARONG (Balikpapan-Samarinda-Tenggarong). Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Kebutuhan dunia terhadap sumber daya mineral dan migas yang cukup tinggi, ditambah dengan mulai berkurangnya sumber-sumber mineral dan migas di wilayah lain menjadikan Kabupaten Kutai Timur berpeluang besar terhadap pasar internasional. Besarnya potensi bahan tambang membuat struktur ekonomi kabupa-

ten ini bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur berkisar antara 81% sampai 89% selama kurun waktu tahun 2000–2012.

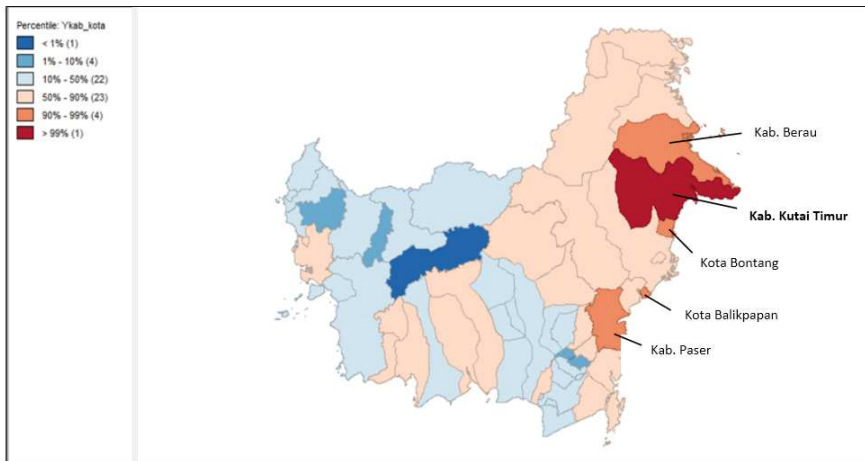
Seperti dijelaskan sebelumnya, pusat pertumbuhan dapat mendorong *spread effect* (pengaruh positif) dan *backwash effect* (pengaruh negatif) terhadap daerah di sekitarnya. Kabupaten Kutai Timur merupakan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten tersebut mampu memberi pengaruh positif atau *spread effect* terhadap daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Berau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini terlihat dari PDRB per kapita Kabupaten Berau merupakan tertinggi kedua se-Kalimantan setelah Kabupaten Kutai Timur selama periode tahun 2000–2012. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 60,68% pada tahun 2012. Hal ini didukung pula dengan keberadaan PT. Berau Coal, salah satu perusahaan penambangan batu bara terbesar di Indonesia. Tiga kabupaten lain yang juga berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan memiliki nilai LISA tinggi adalah Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. PDRB per kapita ketiga kabupaten ini masih di bawah PDRB per kapita Kabupaten Berau. Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Malinau bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan di Kota Bontang.

Kabupaten/kota yang memiliki nilai LISA rendah adalah daerah-daerah yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Kabupaten Sekadau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau, sedangkan Kabupaten Melawi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sintang. Tiga kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita terendah se-Kalimantan. Rendahnya PDRB per kapita daerah-daerah tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang mana kondisi topografi ketiga wilayah tersebut sebagian besar berupa perbukitan.

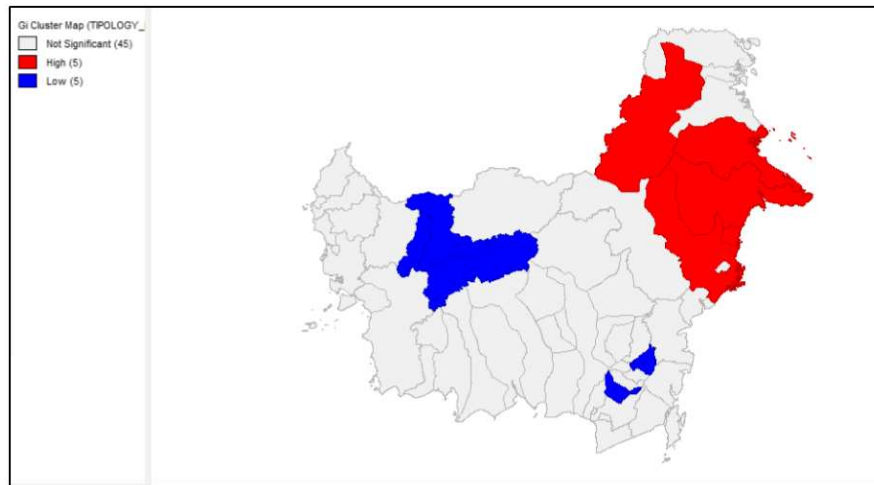
Dari hasil *G* Cluster Map* (Gambar 10) diperoleh bahwa kluster di bagian timur Pulau Kalimantan, yang terdiri dari Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau merupakan daerah *hot spot*, artinya terdapat konsentrasi pertumbuhan yang tinggi di lima daerah tersebut. Kluster yang terdiri dari 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan



Gambar 8: *LISA Cluster Map* PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012
 Sumber: Hasil Pengolahan dengan *GeoDa*



Gambar 9: Pola Spasial PDRB per Kapita Non-Migas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012
 Sumber: Hasil Pengolahan dengan *GeoDa*



Gambar 10: *G* Cluster Map PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012*
 Sumber: Hasil Pengolahan dengan *GeoDa*

Barat, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi, serta 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tapin dan Kabupaten Balangan merupakan daerah *cold spot*, artinya kelima daerah tersebut memiliki konsentrasi pertumbuhan yang rendah.

Analisis Overlay

Berdasarkan hasil analisis *overlay*, Pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai indeks LQ (yaitu SLQ, rasio pertumbuhan wilayah (RPs), dan rasio pertumbuhan referensi (RPR)) diperoleh bahwa tidak ada satupun sektor ekonomi di Pulau Kalimantan termasuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen (+++), artinya bahwa Pulau Kalimantan tidak memiliki sektor yang mempunyai pertumbuhan dan kontribusi sektoral yang lebih tinggi dari tingkat nasional (Tabel 5). Dengan kata lain bahwa Pulau Kalimantan tidak memiliki sektor dengan potensi daya saing kompetitif dan komparatif yang lebih unggul dibanding kegiatan yang sama di tingkat nasional.

Perekonomian Pulau Kalimantan ditopang oleh dua sektor spesialis, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan, yang mana kedua sektor ini hanya menonjol di Pulau Kalimantan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki notasi negatif pada ketiga komponen, artinya, sektor ini tidak potensial di Pulau Kalimantan baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Beberapa sektor ekonomi yang tidak menonjol di Pulau Kalimantan akan tetapi di tingkat nasional menonjol, seperti sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang mana kedua sektor tersebut kurang menonjol di Pulau Kalimantan akan tetapi di tingkat nasional menonjol. Sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Dari hasil analisis *overlay* kabupaten/kota diperoleh bahwa sektor pertambangan dan penggalian bernotasi positif untuk ketiga komponen di lima kabupaten, artinya sektor ini mempunyai pertumbuhan sektoral yang tinggi di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan dan kontribusi sektoral di lima kabupaten ini juga lebih tinggi (lihat Tabel 7). Dengan kata lain, sektor ini memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif yang lebih unggul hanya di lima kabupaten, yaitu di Kabupaten Lamandau (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur).

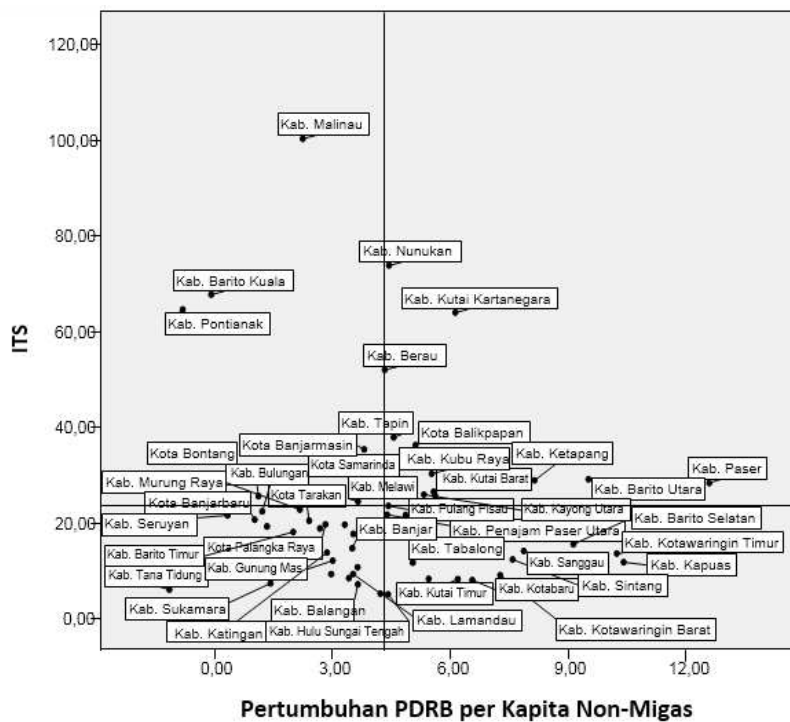
Transformasi Struktural

Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Indeks tran-

Tabel 5: Hasil Analisis *Overlay* Pulau Kalimantan (Non-Migas) Tahun 2000–2012

No.	Sektor	RPR	RP _s	SLQ	DLQ	Notasi <i>Overlay</i>
1	Pertanian	0,577	1,076	1,395	0,968	+++
2	Pertambangan dan Penggalan	0,908	1,987	4,909	1,399	+++
3	Industri Pengolahan	0,883	0,467	0,471	0,496	---
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,254	0,932	0,699	0,856	+-
5	Bangunan	1,154	1,105	0,969	1,003	++
6	Perdagangan, Hotel, dan restoran	1,043	1,28	0,934	1,048	++
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,093	0,637	1,162	0,607	++
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,092	1,392	0,484	1,22	++
9	Jasa-jasa	0,91	1,409	0,749	1,256	+-

Sumber: BPS (2000–2012); BPS (2008); BPS (2012), diolah



Gambar 11: Perubahan Struktural Sektoral Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Tahun 2000–2012
 Sumber: Hasil Pengolahan dengan SPSS

sformasi struktural (ITS) digunakan untuk melihat pergeseran peran masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten/kota. Gambar 11 menunjukkan bahwa transformasi struktural di Pulau Kalimantan terjadi di 10 kabupaten/kota yang tersebar di 3 provinsi, kecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Samarinda. Perubahan struktural tercepat terjadi di Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Timur). Hal ini terlihat dari nilai ITS-nya tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Struktur perekonomian Kabupaten Malinau menunjukkan transformasi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan hasil analisis LQ (SLQ dan DLQ) Pulau Kalimantan tahun 2000–2012 (Tabel 6) diperoleh bahwa terjadi perubahan kategori beberapa sektor. Nilai SLQ dan DLQ digunakan untuk melihat apakah sektor-sektor ekonomi termasuk dalam kategori sektor unggulan, prospektif, andalan, atau tertinggal. Sektor pertanian mengalami despesialisasi (penurunan) kategori sektoral dari sektor unggulan menjadi sektor prospektif. Hal ini disebabkan selama periode tahun 2000–2012, kontribusi sektor ini menurun sekitar 9,4% di hampir seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan kecuali di Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat).

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami spesialisasi (peningkatan) kategori sektoral dari sektor prospektif menjadi sektor unggulan. Dari enam kabupaten/kota penyumbang terbesar di sektor ini, hanya Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami peningkatan pangsa. Sektor ini mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja yang mana rata-rata tenaga kerja beralih ke sektor sekunder dan sektor tersier. Walaupun penyerapan tenaga kerja sektor primer mengalami penurunan, tetapi sektor primer masih merupakan sektor unggulan dan dominan bagi perekonomian Pulau Kalimantan.

Sektor bangunan juga mengalami spesialisasi kategori dari kategori sektor tertinggal menjadi sektor andalan. Aktivitas sektor ini berlokasi di Kota Balikpapan dan Kota Bontang (Provinsi Kalimantan Timur). Sektor-sektor yang tidak mengalami perubahan kategori adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan hasil analisis tipologi kabupaten/kota dan autokorelasi spasial *Moran's I* diperoleh bahwa sebagian besar kabupaten/kota di bagian timur Pulau Kalimantan termasuk dalam daerah cepat maju tumbuh. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan tersebar di bagian timur dan barat. Klaster di bagian timur Pulau Kalimantan, meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau memiliki konsentrasi pertumbuhan *hot spot* (klasterisasi tinggi). Sedangkan kabupaten/kota yang terdapat di klaster bagian barat Pulau Kalimantan, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi memiliki konsentrasi pertumbuhan *cold spot* (klasterisasi rendah).

Kedua, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, dan Kota Samarinda merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Kalimantan tidak selalu berada di pusat ibu kota provinsi. Dua ibu kota provinsi, yaitu Kota Palangkaraya dan Kota Samarinda mampu menghasilkan *spread effect* bagi daerah sekitarnya dan mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur, yang mana ketiga kota tersebut termasuk dalam daerah cepat maju dan tumbuh.

Ketiga, Kabupaten Kotawaringin Barat dalam skala nasional dan regional mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya sehingga memiliki daya tarik yang tinggi bagi daerah lain. Kabupaten ini berkembang, selain karena sektor industri pengolahan juga didukung oleh sektor pertanian terutama subsektor perkebunan. Keberadaan perkebunan besar kelapa sawit dan dua perusahaan kilang minyak sawit, serta didukung beberapa kawasan strategis, seperti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Pangkalan Bun dan Kawasan Strategis Ekonomi Sektor Unggulan Agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai membuat kabupaten ini layak dijadikan pusat pertumbuhan baru. Kota Balikpapan tumbuh

Tabel 6: Klasifikasi Kategori Sektor Non-Migas Pulau Kalimantan (Berdasarkan Hasil LQ), 2000–2012

No.	Sektor	Kategori Sektor	
		2000–2006	2007–2012
1	Pertanian	Unggulan	Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	Prospektif	Unggulan
3	Industri Pengolahan	Tertinggal	Tertinggal
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Tertinggal	Tertinggal
5	Bangunan	Tertinggal	Andalan
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Andalan	Andalan
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Prospektif	Prospektif
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Andalan	Andalan
9	Jasa-jasa	Andalan	Andalan

Sumber: BPS (2000–2012); BPS (2008); BPS (2012), diolah

lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain karena didukung oleh pertumbuhan koridor ke Kota Samarinda, ke selatan melalui Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, penambangan batu bara yang semakin meningkat, investasi penting untuk pelabuhan batu bara, dan Kawasan Industri Kariangau di Teluk Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota tujuan pengembangan PKN di Pulau Kalimantan yang akan difokuskan sebagai kota perdagangan atau jasa dengan optimalisasi infrastruktur udara dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer di samping Kota Banjarmasin dan Kota Pontianak, sedangkan Kota Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat) akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan tersier. Kabupaten Kutai Timur telah menjadi *the gateway to north* Indonesia dengan didukung pembangunan pelabuhan regional dan internasional Maloy. Selain itu terdapat *Maloy Trans-Kalimantan Economic Zone* (MTKZ) seluas 32.800 hektar yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan salah satu lokus atau pusat pembangunan dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Kalimantan.

Keempat, berdasarkan hasil analisis *overlay* Pulau Kalimantan diperoleh bahwa tidak ada satupun sektor di Pulau Kalimantan tergolong dalam sektor unggulan yang kompetitif dan komparatif di tingkat nasional. Hanya dua sektor yang menonjol di Pulau Kalimantan dan tergolong dalam sektor spesialis, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sedangkan dari hasil analisis *overlay* kabupaten/kota diperoleh bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor potensial karena memiliki keunggulan-kompetitif, baik di Pulau Kalimantan maupun di lima kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam naskah MP3EI yaitu "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang

dan Lumbung Energi Nasional".

Dan *kelima*, transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Perubahan struktural tercepat terjadi di Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Timur). Perkembangan ekonomi di kabupaten tersebut menunjukkan transformasi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut. *Pertama*, perlu dilakukan evaluasi dan penelitian lebih lanjut tentang penetapan ibu kota-ibu kota provinsi sebagai pusat pertumbuhan di Koridor Ekonomi Kalimantan mengingat pusat-pusat pertumbuhan tidak selalu berada di pusat ibu kota provinsi sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Juga perlu mengkaji kembali tentang penetapan pengembangan kawasan andalan yang belum optimal dan penetapan daerah tertinggal. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.**

Kedua, tema pembangunan Koridor Ekonomi (KE) Kalimantan dalam naskah MP3EI sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional perlu dievaluasi kembali, mengingat konsentrasi pertumbuhan di Pulau Kalimantan lebih dominan di bagian timur Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur memang terkenal kaya akan migas, batu bara, dan industri besar, dan hal ini tidak terjadi bagi daerah-daerah lain seperti di bagian barat dan tengah. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas.**

Ketiga, konektivitas di KE Kalimantan masih ter-

kendala dengan belum tersedianya infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah pembangunan jalan Trans-Kalimantan perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang mengalami kendala terkait dengan permasalahan tumpang tindih jalan dan ketidakpastian tentang proses percepatan pembangunan jalur rel Kereta Api (KA) Lintas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk itu, perlu dilakukan penataan status lahan dan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan tata aturan yang terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang yang disepakati oleh semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Kementerian sektoral¹, maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Keempat, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Balikpapan dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Koridor Ekonomi Kalimantan. Posisi kedua daerah ini sangat strategis berada di jalur jalan Trans-Kalimantan dan memiliki beberapa kawasan strategis, seperti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Pangkalan Bun dan Kawasan Strategis Ekonomi Sektor Unggulan Agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai, serta Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan. Selain itu, kedua daerah tersebut memiliki bandara udara dan pelabuhan yang memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun mancanegara (ekspor-impor). Selain itu, terdapat potensi wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti kawasan suaka alam Taman Nasional Tanjung Puting, Tanjung Keluang, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau, dan Hutan Lindung. Balikpapan adalah pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional. Kota Balikpapan ditetapkan sebagai kota *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Kelima, untuk mendukung pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan baru, yaitu Kabupaten

Kotawaringin Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur, dapat diberikan perlakuan khusus seperti meningkatkan pendanaan pembangunan dengan melengkapi sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan baru tersebut dan perluasan jaringan transportasi, sehingga para investor swasta dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Keenam, program pembangunan di Pulau Kalimantan harus lebih diarahkan pada program-program yang mendorong kinerja sektor pertanian sehingga tidak mengandalkan pada sektor pertambangan dan penggalian mengingat nilai produksi sektor migas di Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Penataan dasar yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas melalui pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, promosi investasi dan perdagangan, serta mengembangkan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar-sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Pembangunan pertanian di Pulau Kalimantan ke depan tidak lagi dilakukan secara tradisional, akan tetapi harus lebih diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (*value added*), dan daya saing produk (*competitiveness*). Selanjutnya secara proposional, peran migas, pertambangan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap melalui pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya sehingga perekonomian wilayah Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Ketujuh, memperkuat kemitraan dan koordinasi antar-lembaga pemerintah melalui penyusunan regulasi untuk mengatur kerja sama antar-sektor pembangunan dan antar-daerah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Kerja sama tersebut harus didasari dengan kesukarelaan dan tidak cenderung mengedepankan ego kewilayahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan para Gubernur se-Kalimantan pada tahun 2011 hingga sekarang adalah Forum Kerja sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Dalam forum tersebut telah disepakati Program Pembangunan

¹Kementerian yang membidangi urusan/sektor tertentu.

Bersama Kalimantan yang meliputi bidang infrastruktur, tata ruang, dan sumber daya manusia. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Kedelapan, meningkatkan daya tarik investasi dalam pengembangan komoditi unggulan di daerah tertinggal melalui pemberian insentif dan kemudahan perizinan, kemudahan akses terhadap lahan bagi investor, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Kesembilan, meningkatkan aksesibilitas antar-daerah, khususnya bagi daerah tertinggal dan daerah perbatasan melalui peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan moda transportasi perintis pada daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau transportasi umum, dan pengembangan kerja sama antar-daerah dalam pengembangan transportasi. **Tindak lanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Daftar Pustaka

- [1] Adams-Kane, J., & Lim, J. J. (2011). Growth Poles and Multipolarity. *World Bank Policy Research Working Paper Series*, 5712. The World Bank. Development Economics. Prospect Group. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/896081468128113149/pdf/WPS5712.pdf>. Tanggal akses 10 September 2014.
- [2] Ardila, R. (2012). Analisis pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1–9.
- [3] Bappenas. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025*. Jakarta: Bappenas. Diakses dari http://bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11060/3437/. Tanggal akses 10 Desember 2004.
- [4] Bappenas. (2012). *Paparan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas: Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan, RPJMN 2015–2019*. Jakarta: Bappenas.
- [5] BPS. (1978–2012). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi, 1978–2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [6] BPS. (2000–2012). *Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota, 2000–2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [7] BPS. (2008). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2003–2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [8] BPS. (2008–2012). *Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2000–2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [9] BPS. (2012). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2008–2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [10] Danastri, S. (2011). Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [11] Kartika, Y. (2007). Pola Penyebaran Spasial Demam Berdarah Dengue di Kota Bogor Tahun 2005. *Skripsi*. Departemen Statistika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor.
- [12] Kosfeld, R. (2006). *Spatial Econometrics*. Germany: University of Kassel. Diakses dari <https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IVWL/Kosfeld/lehre/spatial/SpatialEconometrics1.pdf>. Tanggal akses 13 Oktober 2014.
- [13] Kosfeld, R. (2011). *Data Management and Basic Mapping with GeoDa*. Institut of Economics, University of Kassel. Diakses dari <http://studylib.net/doc/6888625/data-management-and-basic-mapping-with-geoda>. Tanggal akses 13 Oktober 2014.
- [14] Kubis, A., Titze, M., & Ragnitz, J. (2007). Spillover Effects of Spatial Growth Poles - a Reconciliation of Conflicting Policy Targets?. *IWH Discussion Papers Nr. 8/2007*. Germany: Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Diakses dari http://www.iwh-halle.de/fileadmin/user_upload/publications/iwh_discussion_papers/8-07.pdf. Tanggal akses 13 Oktober 2014.
- [15] Kuncoro, M., & Idris, A. N. (2010). Mengapa Terjadi Growth Without Development di Provinsi Kalimantan Timur?. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 172–190.
- [16] Mushuku, A. & Takuva, R. (2013). Growth Points or Ghost Towns? Post Independence Experiences of the Industrialisation Process at Nemamwa Growth Points in Zimbabwe. *International Journal of Politics and Good Governance*, 4 (4.4) Quarter IV, 1–27.
- [17] Muta'ali, L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 17(1), 33–51.
- [18] Ogunleye, E. K. (2011). Structural Transformation in Sub-Saharan Africa: The Regional Growth Poles Strategy. *Conference Papers*. African Economic Conference, 26–28 October 2011, Addis Ababa, Ethiopia. Diakses dari http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2011/ogunleye-ssa_economic_transformation_through_growth_poles_1.pdf. Tanggal akses 10 September 2014.
- [19] Pamungkas, P. B. (2013). Efek Limpahan dari Kutub-Kutub Pertumbuhan Wilayah Kabupaten dan Kota di Koridor Ekonomi Sulawesi. *Tesis*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- [20] Rahayu, E., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C290–C295.
- [21] Sridhar, K. S. (2006). Local Employment Impact of Growth Centres: Evidence from India. *Urban Studies*, 43(12), 2205–2235.
- [22] Sugiyanto. (2010). Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau. *Jurnal*

Tabel 7: Hasil Analisis Overlay Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012 – Bagian 1

No.	Kabupaten/Kota	1				2				3				4				5			
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda
1	Kab. Sambas	0,57	1,46	2,21	++	1,64	0,78	0,01		0,37	1,59	0,77		0,63	0,88	0,48	---	1,25	0,78	0,39	
2	Kab. Bengkayang	0,57	2,40	2,10	++	1,64	0,75	0,08		0,37	2,98	0,41		0,63	0,61	0,20	---	1,25	1,07	0,97	
3	Kab. Landak	0,57	3,30	2,33	++	1,64	-0,61	0,06		0,37	3,40	0,85		0,63	2,41	0,44		1,25	1,84	0,4	
4	Kab. Pontianak	0,57	-1,09	1,07		1,64	-0,49	0,01		0,37	-1,80	2,45		0,63	-0,46	1,89		1,25	0,12	0,42	
5	Kab. Sanggau	0,57	1,27	1,69	++	1,64	0,22	0,07		0,37	1,16	2,22	++	0,63	1,45	0,53		1,25	0,85	0,64	
6	Kab. Ketapang	0,57	1,24	1,64	++	1,64	1,77	0,50		0,37	4,84	1,60	++	0,63	1,18	0,78		1,25	0,89	0,35	
7	Kab. Sintang	0,57	0,90	1,87		1,64	0,31	0,17		0,37	3,33	0,78		0,63	0,76	0,52	---	1,25	0,82	1,07	
8	Kab. Kapuas Hulu	0,57	0,42	2,10		1,64	8,59	0,05		0,37	-3,07	0,36	---	0,63	0,96	0,6	---	1,25	0,89	2,02	
9	Kab. Sekadau	0,57	1,45	2,3	++	1,64	0,17	0,12		0,37	1,24	1,05	++	0,63	2,8	0,32		1,25	0,86	1,13	
10	Kab. Melawi	0,57	0,35	1,62		1,64	0,41	0,20		0,37	3,22	0,81		0,63	1,32	0,45		1,25	1,60	0,94	
11	Kab. Kayong Utara	0,57	1,15	2,20	++	1,64	0,98	0,09		0,37	3,18	1,57	++	0,63	1,15	1,12	++	1,25	0,88	0,5	
12	Kab. Kubu Raya	0,57	1,69	0,91		1,64	0,76	0,02		0,37	0,95	4,08		0,63	0,79	1,05		1,25	1,35	0,14	
13	Kota Pontianak	0,57	4,46	0,05		1,64	0	0		0,37	1,86	0,68		0,63	0,68	1,11		1,25	0,72	2,59	
14	Kota Singkawang	0,57	1,23	0,66		1,64	0,46	0,08		0,37	1,83	0,67		0,63	0,38	3,96		1,25	0,77	1,29	
15	Kab. Tanah Laut	0,57	1,11	1,51	++	1,64	0,75	0,40		0,37	2,85	1,62	++	0,63	0,57	0,31	---	1,25	0,89	0,34	

No.	Kabupaten/Kota	6				7				8				9			
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda
1	Kab. Sambas	0,92	1,05	1,61	++	1,20	0,52	0,43		1,4	0,39	0,94		1,07	0,79	0,64	
2	Kab. Bengkayang	0,92	0,85	1,62		1,20	0,79	0,31		1,4	0,48	1,03		1,07	1,09	0,96	
3	Kab. Landak	0,92	2,89	1,39	++	1,20	2,80	0,32		1,4	1,53	0,85		1,07	1,64	0,69	
4	Kab. Pontianak	0,92	-0,51	1,15		1,20	-0,44	0,41		1,4	-0,24	0,67		1,07	0,18	1,97	
5	Kab. Sanggau	0,92	1,38	1,00	++	1,20	0,86	0,26		1,4	0,54	0,61		1,07	1,04	1,12	+++
6	Kab. Ketapang	0,92	1,35	0,99		1,20	1,02	0,34		1,4	0,78	0,95		1,07	0,91	0,95	
7	Kab. Sintang	0,92	1,10	1,35	++	1,20	0,81	0,35		1,4	0,62	0,76		1,07	0,85	1,34	
8	Kab. Kapuas Hulu	0,92	0,76	1,04		1,20	0,51	0,45		1,4	0,47	1,06		1,07	0,59	1,26	
9	Kab. Sekadau	0,92	1,21	1,08	++	1,20	0,66	0,26		1,4	0,65	0,94		1,07	0,82	0,40	
10	Kab. Melawi	0,92	1,08	1,86	++	1,20	0,45	0,19		1,4	0,85	0,68		1,07	1,15	1,09	+++
11	Kab. Kayong Utara	0,92	1,16	0,71		1,2	1,11	0,34		1,4	0,86	0,91		1,07	3,74	1,09	+++
12	Kab. Kubu Raya	0,92	0,62	1,03		1,20	2,56	0,66		1,4	0,62	0,47		1,07	7,8	0,31	
13	Kota Pontianak	0,92	1,19	1,31	++	1,20	0,6	2,24		1,4	0,51	2,23		1,07	0,48	2,73	
14	Kota Singkawang	0,92	0,97	2,21		1,20	0,91	0,70		1,4	0,72	1,34		1,07	0,90	1,97	
15	Kab. Tanah Laut	0,92	1,05	1,42	++	1,20	0,72	0,21		1,4	0,64	0,71		1,07	0,95	1,06	

bersambung...

Tabel 8: Hasil Analisis *Overlay* Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012 – Bagian 2

No.	Kabupaten/Kota	1				2				3				4				5			
		RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda
16	Kab. Kotabaru	0,57	1,46	1,73	++	1,64	0,49	1,06		0,37	1,81	0,60		0,63	0,50	0,30	---	1,25	0,95	0,69	
17	Kab. Banjar	0,57	0,96	1,35		1,64	0,53	0,87		0,37	2,86	0,53		0,63	0,65	1,26		1,25	1,06	0,83	
18	Kab. Barito	0,57	0,92	1,37		1,64	0	0		0,37	-3,24	2,74		0,63	1,12	0,23		1,25	2,04	0,94	
19	Kab. Tapin	0,57	1,06	2,13	++	1,64	4,48	0,55		0,37	4,22	0,33		0,63	0,88	0,77	---	1,25	0,35	0,9	
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,57	0,78	1,89		1,64	2,33	0,09		0,37	1,70	0,57		0,63	0,79	0,59	---	1,25	0,43	0,72	
21	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,57	1,46	1,83	++	1,64	0,33	0,02		0,37	2,81	0,71		0,63	1,13	0,51		1,25	0,74	0,64	
22	Kab. Hulu Sungai Utara	0,57	1,29	1,56	++	1,64	0,44	0		0,37	0,88	0,87	---	0,63	0,85	1,00		1,25	0,78	0,94	
23	Kab. Tabalong	0,57	0,82	0,82	---	1,64	0,69	2,96		0,37	2,54	0,11		0,63	0,26	0,22	---	1,25	0,64	0,35	
24	Kab. Tanah Bumbu	0,57	1,65	0,79		1,64	0,51	2,25		0,37	1,50	0,71		0,63	0,50	0,51	---	1,25	0,97	0,75	
25	Kab. Balangan	0,57	1,01	1,06	++	1,64	0,54	3,21		0,37	2,39	0,02		0,63	1,51	0,18		1,25	1,09	0,25	
26	Kota Banjarmasin	0,57	2,14	0,05		1,64	0	0		0,37	-0,87	1,81		0,63	0,98	2,99		1,25	0,94	1,33	
27	Kota Banjarbaru	0,57	1,03	0,25		1,64	0,16	0,43		0,37	0,97	1,28		0,63	1,01	3,36	++	1,25	0,96	2,33	
28	Kab. Kotawaringin Barat	0,57	1,48	2,12	++	1,64	1,41	0,05		0,37	2,58	1,24	++	0,63	1,89	0,57		1,25	0,74	0,57	
29	Kab. Kotawaringin Timur	0,57	1,57	1,83	++	1,64	0,91	0,04		0,37	1,94	1,31	++	0,63	1,35	0,60		1,25	1,18	0,55	
30	Kab. Kapuas	0,57	1,41	2,54	++	1,64	0,79	0,02		0,37	0,45	0,50	---	0,63	0,32	0,50	---	1,25	0,75	1,2	

No.	Kabupaten/Kota	6				7				8				9							
		RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda	RPR	RP	SLQ	Tanda				
16	Kab. Kotabaru	0,92	1,19	0,99		1,20	0,47	0,94		1,40	1,27	0,22		1,07	1,10	0,51					
17	Kab. Banjar	0,92	1,31	1,31	++	1,20	0,74	0,59		1,40	1,08	0,76		1,07	0,97	1,28					
18	Kab. Batola	0,92	2,2	0,61		1,20	-0,10	0,18		1,40	1,03	0,48		1,07	0,81	0,90					
19	Kab. Tapin	0,92	0,62	0,58	---	1,20	0,47	0,25		1,40	0,35	0,87		1,07	0,059	2,07					
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,92	0,78	1,12		1,20	0,57	0,61		1,40	0,75	0,75		1,07	0,87	2,32					
21	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,92	1,04	0,85		1,20	0,78	0,76		1,40	0,84	1,21		1,07	0,73	2,72					
22	Kab. Hulu Sungai Utara	0,92	0,84	1,17		1,20	0,65	0,81		1,40	0,75	0,83		1,07	0,83	2,43					
23	Kab. Tabalong	0,92	0,79	0,39	---	1,20	0,90	0,19		1,40	0,69	0,56		1,07	1,21	1,00					
24	Kab. Tanah Bumbu	0,92	1,41	0,59		1,20	1,84	1,11	+++	1,40	1,86	0,24		1,07	1,41	0,43					
25	Kab. Balangan	0,92	1,67	0,19		1,20	0,82	0,27		1,40	0,83	0,20		1,07	1,01	0,57					
26	Kota Banjarmasin	0,92	1,63	1,13	++	1,20	0,73	2,94		1,40	1,93	1,91	+++	1,07	1,1	1,49	+++				
27	Kota Banjarbaru	0,92	1,16	1,39	++	1,20	0,69	0,88		1,40	1,38	0,81		1,07	0,99	2,39					
28	Kab. Kotawaringin Barat	0,92	1,22	0,96		1,20	0,86	0,89		1,40	1,24	0,58		1,07	1,22	0,96					
29	Kab. Kotawaringin Timur	0,92	1,56	1,20	++	1,20	0,60	1,21		1,40	1,08	0,60		1,07	0,73	0,83					
30	Kab. Kapuas	0,92	1,21	0,86		1,20	0,28	0,43		1,40	0,90	1,01		1,07	0,47	1,08					

bersambung...

Tabel 9: Hasil Analisis *Overlay* Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012 – Bagian 3

No.	Kabupaten/Kota	1				2				3				4				5			
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda
31	Kab. Barito Selatan	0,57	0,92	1,84		1,64	0,73	0,02		0,37	2,81	0,46		0,63	0,47	0,71	---	1,25	1,08	1,21	+++
32	Kab. Barito Utara	0,57	0,15	1,47		1,64	0,79	0,91		0,37	0,26	0,44	---	0,63	0,61	0,99	---	1,25	0,66	1,05	
33	Kab. Sukamara	0,57	1,19	3,38	++	1,64	0,46	0,02		0,37	2,36	0,19		0,63	2,44	0,22		1,25	1,09	0,26	
34	Kab. Lamandau	0,57	1,30	1,88	++	1,64	3,88	3,11	+++	0,37	3,12	0,04		0,63	2,28	0,06		1,25	1,25	0,17	
35	Kab. Seruyan	0,57	0,95	2,64		1,64	0,33	0,07		0,37	1,71	0,61		0,63	1,52	0,36		1,25	0,91	0,36	
36	Kab. Katingan	0,57	0,94	2,18		1,64	0,27	0,21		0,37	1,23	0,54		0,63	0,68	0,28	---	1,25	1,21	0,41	
37	Kab. Pulang Pisau	0,57	1,49	2,55	++	1,64	0,49	0,01		0,37	1,51	0,51		0,63	0,53	0,47	---	1,25	0,84	1,31	
38	Kab. Gunung Mas	0,57	1,26	2,43	++	1,64	0,51	0,50		0,37	0,33	0,22		0,63	0,67	0,24	---	1,25	1,2	1,07	+++
39	Kab. Barito Timur	0,57	0,98	2,49		1,64	1,71	0,03		0,37	1,39	0,35		0,63	1,15	0,39		1,25	0,67	1,13	
40	Kab. Murung Raya	0,57	0,44	1,52		1,64	0,23	1,78		0,37	3,34	0,24		0,63	1,78	0,52		1,25	1,33	0,58	
41	Kota Palangkaraya	0,57	1,50	0,27		1,64	0,48	0,08		0,37	2,75	0,43		0,63	0,71	2,99		1,25	0,71	1,23	
42	Kab. Paser	0,57	1,19	0,80		1,64	1,17	3,41	+++	0,37	2,59	0,15		0,63	1,61	0,37		1,25	1,53	0,43	
43	Kab. Kutai Barat	0,57	0,19	0,91	---	1,64	0,87	2,46		0,37	3,6	0,18		0,63	1,50	0,44		1,25	1,17	2	+++
44	Kab. Kutai Kartanegara	0,57	0,47	1,25		1,64	1,72	1,42	+++	0,37	2,26	0,62		0,63	1,10	0,48		1,25	1,34	1,95	+++

No.	Kabupaten/Kota	6				7				8				9							
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda				
31	Kab. Barito Selatan	0,92	1,27	0,87		1,20	0,59	1,48		1,40	0,97	0,98		1,07	0,61	1,78					
32	Kab. Barito Utara	0,92	0,91	0,91	---	1,20	0,77	0,85		1,40	1,07	0,66		1,07	1,06	1,42	+++				
33	Kab. Sukamara	0,92	1,23	0,86		1,20	0,46	0,17		1,40	1,49	0,41		1,07	1,05	0,71					
34	Kab. Lamandau	0,92	1,24	0,04		1,20	1,03	0,93		1,40	0,83	0,40		1,07	1,05	0,54					
35	Kab. Seruyan	0,92	1,56	0,96		1,20	0,53	0,81		1,40	0,62	0,42		1,07	1,61	0,89					
36	Kab. Katingan	0,92	0,88	1,05		1,20	0,72	1,25		1,40	0,70	0,37		1,07	0,92	1,20					
37	Kab. Pulang Pisau	0,92	0,98	1,04		1,20	0,08	0,26		1,40	7,36	0,73		1,07	0,80	1,10					
38	Kab. Gunung Mas	0,92	1,33	0,74		1,20	0,02	0,28		1,40	0,39	0,34		1,07	0,78	1,57					
39	Kab. Barito Timur	0,92	0,96	0,66	---	1,20	1,57	0,65		1,40	1,12	0,75		1,07	0,85	1,83					
40	Kab. Murung Raya	0,92	0,85	0,50	---	1,20	0,50	0,60		1,40	0,94	0,38		1,07	0,63	1,25					
41	Kota Palangkaraya	0,92	1,73	1,01	++	1,20	0,38	2,16		1,40	1,25	1,20	+++	1,07	0,64	4,75					
42	Kab. Paser	0,92	1,92	0,18		1,20	0,74	0,11		1,40	0,81	0,30		1,07	1,21	0,37					
43	Kab. Kutai Barat	0,92	1,62	0,44		1,20	1,25	0,18		1,40	0,74	0,47		1,07	1,09	0,49					
44	Kab. Kutai Kartanegara	0,92	1,76	0,75		1,20	0,84	0,27		1,40	0,50	0,54		1,07	1,11	0,57					

bersambung...

Tabel 10: Hasil Analisis *Overlay* Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000–2012 – Bagian 4

No.	Kabupaten/Kota	1				2				3				4				5			
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda
45	Kab. Kutai Timur	0,57	1,05	0,21		1,64	1,06	4,26	+++	0,37	1,02	0,03		0,63	0,94	0,14	---	1,25	0,51	0,34	
46	Kab. Berau	0,57	0,77	0,91	---	1,64	2,05	2,20	+++	0,37	3,50	1,01	++	0,63	0,69	0,19	---	1,25	0,59	0,15	
47	Kab. Malinau	0,57	-1,42	1,93		1,64	7,15	0,71		0,37	5,80	0,01		0,63	2,28	0,65		1,25	3,46	2,58	+++
48	Kab. Bulungan	0,57	1,54	1,62	++	1,64	0,45	0,06		0,37	0,93	2,53		0,63	0,83	1,89		1,25	1,50	0,06	
49	Kab. Nunukan	0,57	0,45	2,03		1,64	10,18	0,76		0,37	16,94	0,02		0,63	1,23	1,67	++	1,25	1,11	1,64	+++
50	Kab. Penajam Paser Utara	0,57	1,68	1,09	++	1,64	0,20	0,06		0,37	2,14	2,80	++	0,63	1,31	0,61		1,25	1,00	0,75	
51	Kab. Tana Tidung	0,57	0,98	1,88		1,64	0,53	1,69		0,37	0,62	0,02	---	0,63	0,79	2,82		1,25	0,95	0,11	
52	Kota Balikpapan	0,57	1,53	0,21		1,64	0,60	0		0,37	2,35	0,26		0,63	0,88	2,51		1,25	1,85	3,14	+++
53	Kota Samarinda	0,57	0,96	0,10	---	1,64	1,65	0,30		0,37	1,39	1,91	++	0,63	0,56	2,46		1,25	1,16	0,84	
54	Kota Tarakan	0,57	1,32	0,51		1,64	0,54	0,04		0,37	2,82	0,95		0,63	1,69	3,99	++	1,25	1,04	0,61	
55	Kota Bontang	0,57	0,05	0,06	---	1,64	-0,96	0,09		0,37	3,18	2,98	++	0,63	1,62	0,88		1,25	1,12	4,86	+++
No.	Kabupaten/Kota	6				7				8				9							
		RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda	RPR	RP's	SLQ	Tanda				
45	Kab. Kutai Timur	0,92	2,16	0,22		1,20	0,76	0,16		1,40	0,49	0,19		1,07	0,69	0,10					
46	Kab. Berau	0,92	0,97	0,66	---	1,20	0,60	0,72		1,40	0,37	0,11		1,07	0,56	0,36					
47	Kab. Malinau	0,92	1,39	1,04	++	1,20	2,20	0,26		1,40	3,74	0,06		1,07	1,15	0,57					
48	Kab. Bulungan	0,92	1,44	0,98		1,20	1,02	0,85		1,40	0,84	0,08		1,07	0,70	0,94					
49	Kab. Nunukan	0,92	2,63	0,93		1,20	1,19	0,39		1,40	1,13	0,05		1,07	1,42	0,90					
50	Kab. Penajam Paser Utara	0,92	1,30	1,34	++	1,20	0,90	0,25		1,40	0,81	0,93		1,07	1,14	0,77					
51	Kab. Tana Tidung	0,92	0,84	0,68	---	1,20	0,29	0,28		1,40	0,39	0,04		1,07	2,02	0,89					
52	Kota Balikpapan	0,92	1,07	2,57	++	1,20	1,27	1,91	+++	1,40	0,70	0,96		1,07	0,65	0,63					
53	Kota Samarinda	0,92	1,41	1,47	++	1,20	0,83	1,28		1,40	0,68	2,48		1,07	0,82	1,66					
54	Kota Tarakan	0,92	1,35	2,53	++	1,20	1,36	1,28	+++	1,40	0,80	2,13		1,07	1,72	0,73					
55	Kota Bontang	0,92	0,64	0,94	---	1,20	0,73	0,44		1,40	0,30	0,95		1,07	0,65	0,44					

Keterangan: 1. Pertanian. 2. Pertambangan dan Penggalian. 3. Industri Pengolahan. 4. Listrik, Gas dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran. 7. Pengangkutan dan Komunikasi. 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. 9. Jasa jasa.

Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 1 (2), 202–215.

- [23] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development, 8th Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- [24] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development, Edisi Kesembilan, Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.